



Bupati Terima Laporan Penyalahgunaan DD

▶ Belasan Kades Diperiksa

KUBU RAYA, SP - Bupati Kubu Raya, Rusman Ali telah menerima laporan adanya dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh sejumlah desa di Kubu Raya.



**“ Rusman Ali
Bupati Kubu Raya**
Saya sudah mendapat laporan, ada belasan desa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan ADD.

Menurut Rusman Ali, sejauh ini masih banyak desa di Kubu Raya yang belum bisa memaksimalkan penggunaan dana desa sesuai peruntukannya, bahkan melakukan penyalahgunaan dalam pengelolaannya.

“Saya sudah mendapat laporan, ada belasan desa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan ADD,” kata Rusman Ali, di Sungai Raya, Rabu (30/5).

Karena itu, selaku pimpinan daerah, dia meminta Inspektorat Kubu Raya segera melakukan pemeriksaan terhadap pemerintahan desa secara ketat. Hal itu perlu dilakukan untuk menelusuri laporan yang ia terima. Dia pun berpesan kepada semua kepala desa agar tidak main-main dalam mengelola DD maupun ADD. Semua penggunaannya harus jelas sesuai peruntukan, dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Jika penggunaan DD ataupun ADD dilakukan secara asal-asalan, maka akan ada sanksi hukum yang bisa diterima. Jadi tolong, jangan asal-asalan menggunakan DD dan ADD,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah

daerah sudah melakukan penyaluran DD dan ADD tahap satu ke 118 desa dengan total Rp22 miliar lebih. Berdasarkan aturan yang ada, penggunaan DD maupun ADD, pemerintah desa diwajibkan menggunakan 30 persen ADD dan DD untuk pembangunan melalui program swakelola.

Artinya, pemerintah desa harus menyiapkan bahan bangunan untuk pembangunan infrastruktur. Pekerjaan pembangunan tak boleh di langkan. Pengerjaannya mesti diserahkan ke masyarakat dengan pola gotong royong.

“Dana desa ini sudah jelas peruntukannya dan harus dilaksanakan sesuai aturan,” katanya.

Kepala Inspektorat Kubu Raya, Gemuruh mengatakan, sejumlah kepala desa di Kubu Raya telah menjalani pemeriksaan dari BPK, Inspektorat maupun kepolisian. Pemeriksaan dilakukan lantaran adanya laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dana des tahun anggaran 2016-2017.

“Memang benar, ada belasan kades yang dilaporkan masyarakatnya terindikasi menyalahgunakan pengelolaan

dana desa. Tapi tidak semuanya bisa kita proses. Sebab, laporan itu tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas maupun bukti yang kuat,” kata Gemuruh.

Menurutnya, dari belasan kepala desa yang dilaporkan, baru tujuh diantaranya yang telah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh BPK, Inspektorat, kepolisian dan kejaksaan. Pemeriksaan ketujuh kades tersebut terkait dengan penggunaan ADD dan DD Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

“Sampai bulan ini ada tujuh kades yang diperiksa, satu diperiksa oleh BPK. Sedangkan yang lain telah dilakukan gelar perkara dengan pihak kepolisian, masih tersisa dua desa lagi, yang direncanakan juga akan diperiksa,” kata Gemuruh.

Inspektorat selaku auditor kata Gemuruh melakukan audit khusus, setelah adanya permintaan dari pihak kepolisian dan kejaksaan, hasilnya disampaikan ke mereka. Tahapan ini sesuai dengan kerja sama yang dilakukan, sebelum dilakukan proses hukum maka dilakukan audit oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP). (abd/jek)